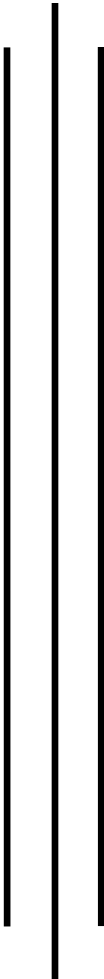


LAMPIRAN X : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2027





**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATAM**



RENJA 2027

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, Juli 2026

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Batam**



Riama Manurung, S.H., M.H.
NIP 197005151997032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah 1

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah..... 1

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya 3

1.2. Dasar Hukum..... 4

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun
2025 9

2.2. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 11

2.3. Rumusan Permasalahan Dan Isu Strategis Tahun 2027 12

2.3.1. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 12

2.3.2. Permasalahan 30

2.3.3. Kondisi Lingkungan Dinamis..... 32

2.4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD 35

2.5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada
masyarakat..... 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 38

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 38

3.2. Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat
Daerah..... 39

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 42

4.1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 43

4.2. Dukungan Program RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Batam terhadap Prioritas Nasional 52

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 55

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 55

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 57

BAB VI PENUTUP..... 59

6.1. Catatan Penting..... 59

6.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 60

6.3. Rencana Tindak Lanjut 60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU Tahun 2025	10
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025	11
Tabel 2.3	Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025	12
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kota Batam	15
Tabel 2.5	Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen RKPD Kota Batam Tahun 2027	35
Tabel 2.6	Pengelompokan Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2027	37
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027	39
Tabel 3.2	Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027	41
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027	43
Tabel 4.2	Dukungan Program RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam terhadap Prioritas Nasional	53
Tabel 5.1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Batam Tahun 2027 dan Target Akhir Tahun 2030	57
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Batam Tahun 2027	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RKPD	2
Gambar 1.2	Tahapan Penyusunan Renja	3
Gambar 1.3	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan pemerintahan umum, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

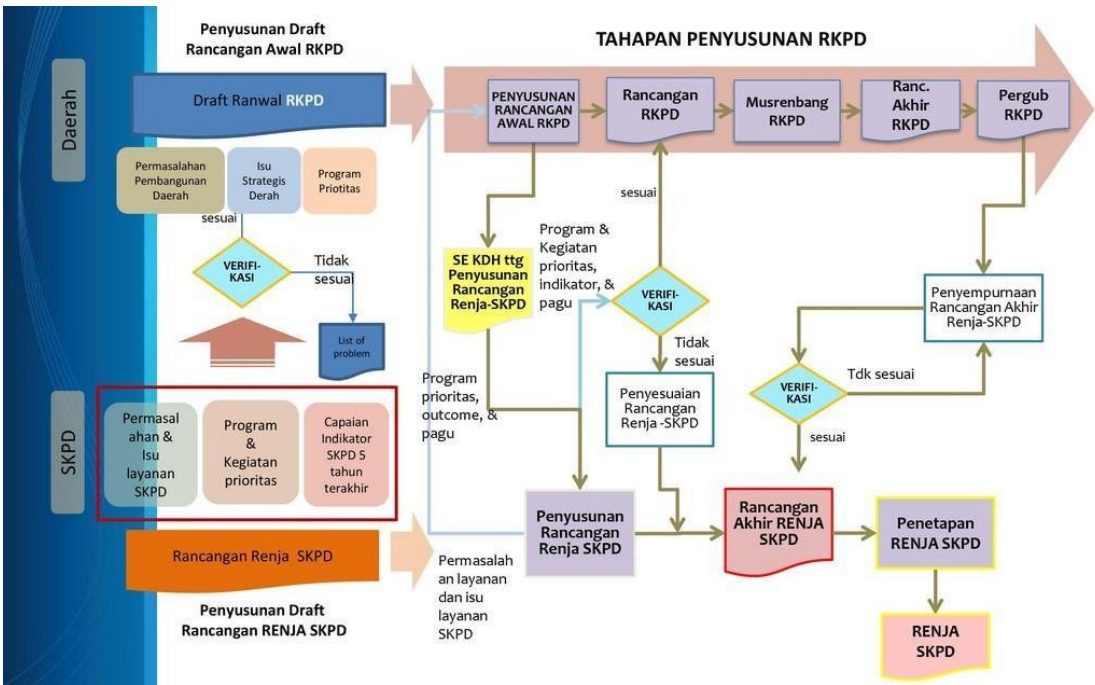
1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

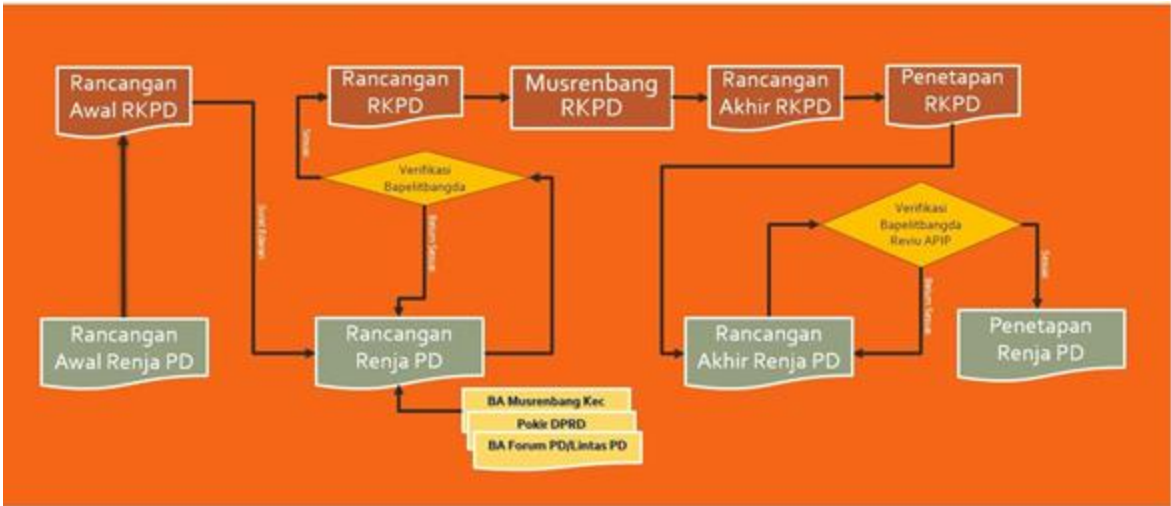
- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renja

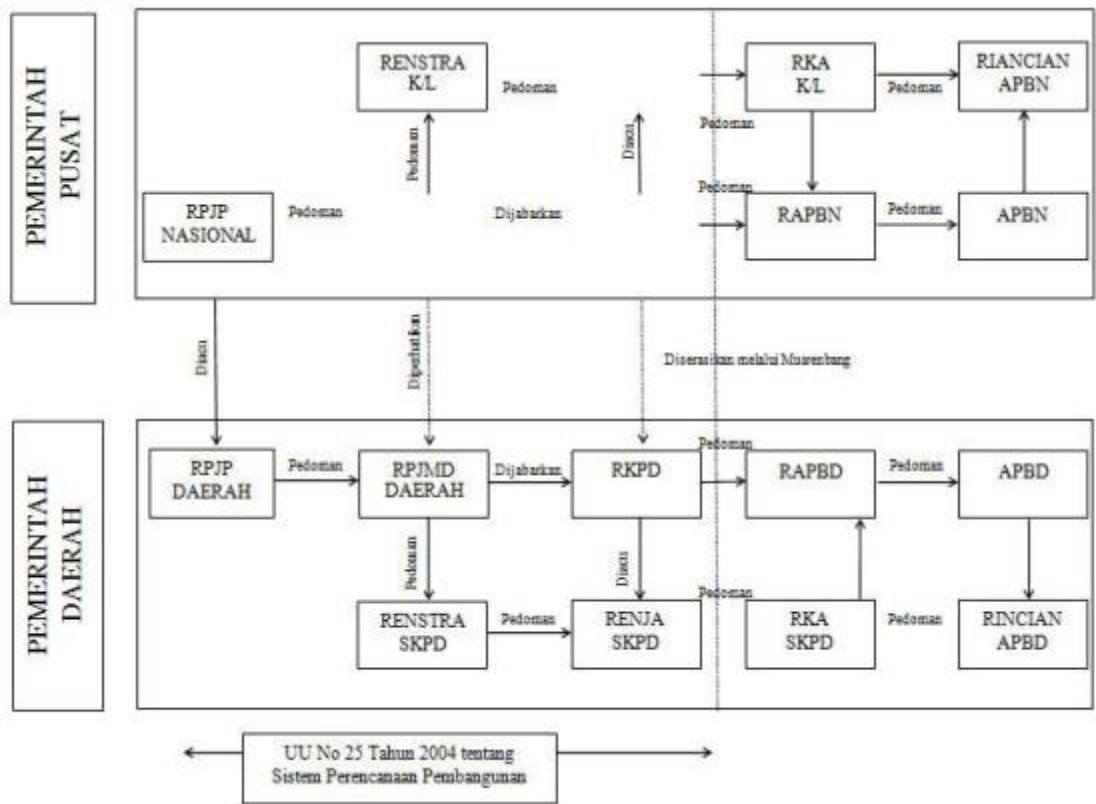


1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.3 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Dasar hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1632);

14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1718).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2027, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun Anggaran 2027.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).

3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam memiliki lima Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari keseluruhan indikator tersebut, empat indikator (80%) memperoleh status kinerja Sangat Tinggi (ST) dan satu indikator (20%) memperoleh status Sangat Rendah (SR). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah mampu mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, meskipun masih terdapat indikator yang memerlukan peningkatan kinerja.

Indikator Angka Konflik yang Terasilitasi memperoleh capaian sebesar 91,17% dengan status Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa upaya fasilitasi penyelesaian konflik sosial telah dilaksanakan secara efektif melalui koordinasi, mediasi, deteksi dini, dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Indikator Persentase masyarakat sasaran dan ASN yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memperoleh capaian sebesar 42,10% dengan status Sangat Rendah (SR). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum mampu menjangkau seluruh sasaran yang direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan melalui peningkatan jumlah kegiatan, perluasan cakupan peserta, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi metode pelaksanaan agar target akhir RPJMD dapat tercapai.

Indikator Persentase masyarakat dan partai politik yang dibina mencapai 104% dari target yang ditetapkan sehingga memperoleh status Sangat Tinggi (ST). Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pembinaan politik kepada masyarakat dan partai politik dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat.

Indikator Persentase konsolidasi kerukunan antaragama mencapai 100% dengan status Sangat Tinggi (ST). Hal tersebut mencerminkan terpeliharanya kehidupan masyarakat yang harmonis melalui koordinasi

dan pembinaan yang berkelanjutan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, dan instansi terkait.

Indikator Persentase Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR) memperoleh capaian sebesar 97,33% dengan status Sangat Tinggi (ST). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pembentukan dan pembinaan Kelurahan Bersinar telah berjalan dengan baik melalui kolaborasi bersama Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1	Angka Konflik yang terfasilitasi	Konflik		34 Konflik	31 Konflik	91.17%	ST	187 Konflik
	Persentase masyarakat sasaran dan ASN yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persentase		95%	40%	42.10%	SR	96%
	Persentase masyarakat dan partai politik yang dibina	Persentase		90%	94%	104%	ST	95%
	Persentase konsolidasi kerukunan antar agama	Persentase		100%	100%	100%	ST	100%
	Persentase Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR)	Persentase		89.9%	87.5%	97.33%	ST	96%

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025–2029 serta arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027, diketahui bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Batam tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan sebagai indikator kinerja perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator program, dan indikator kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Dengan tidak adanya Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam pada Tahun 2025, maka evaluasi terhadap capaian IKK tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, pada dokumen Renja Tahun 2027 tidak disajikan analisis capaian maupun tingkat keberhasilan IKK. Evaluasi kinerja perangkat daerah tetap dilaksanakan melalui pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator program, serta indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025–2029 sebagai dasar pengendalian, evaluasi, dan peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
			NIHIL					

2.2. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023–2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam tidak memiliki indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik bukan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, capaian kinerja perangkat daerah diukur melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Selama periode 2023–2025, pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai target yang ditetapkan, ditunjukkan dengan terlaksananya fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan partisipasi politik masyarakat, penguatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta upaya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Badan Kesbangpol terus mengalami peningkatan dan mendukung terwujudnya stabilitas politik, keamanan, dan kerukunan masyarakat di Kota Batam.

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi		
			2023	2024	2025
NIHIL					

2.3. Rumusan Permasalahan Dan Isu Strategis Tahun 2027

2.3.1. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta sebagai dasar penyusunan perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir Tahun 2025.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari sebagian besar indikator program dan kegiatan yang mampu mencapai target bahkan beberapa di antaranya melebihi target yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2025 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Pelayanan Kesekretariatan mencapai 100% dari target, sedangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 70,64 dari target 72,50 atau mencapai 97,43%. Sebagian besar kegiatan administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, pengadaan barang milik daerah, serta pemeliharaan barang milik daerah juga menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi.
- B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan secara umum berhasil mencapai target program sebesar 100%. Namun demikian, pada beberapa subkegiatan masih terdapat capaian yang belum optimal, seperti pelaksanaan koordinasi bidang ideologi dan wawasan kebangsaan yang mencapai 62,67% serta kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga yang mencapai 24%.

Sementara itu, kegiatan pembentukan Paskibraka dan pembinaan Purnapaskibraka berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

- C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, indikator persentase pendidikan politik berhasil mencapai target sebesar 100%, sedangkan ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik bahkan melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 103%. Seluruh kegiatan sosialisasi pendidikan politik dan monitoring evaluasi juga terlaksana sesuai target.
- D. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan menunjukkan capaian yang cukup baik. Meskipun indikator program mencapai sekitar 88,17% dari target, kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan justru melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 111,76%. Adapun kegiatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan masih mencapai sekitar 82% dari target peserta yang direncanakan.
- E. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, indikator kebijakan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama mencapai 105% dari target, sedangkan seluruh kelurahan sasaran berhasil mempertahankan keberadaan Satgas Kelurahan Bersinar dengan tingkat capaian 100%. Namun demikian, kegiatan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kerukunan umat beragama masih mencapai sekitar 83,78% dari target.
- F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial menunjukkan hasil yang baik. Indikator rekomendasi hasil koordinasi mencapai 117% dari target, sedangkan persentase masyarakat yang memperoleh pemahaman mengenai kewaspadaan dan deteksi dini mencapai 113%. Meskipun demikian, sub kegiatan penyusunan bahan rumusan kebijakan masih terealisasi sebesar 80,43% dan kegiatan koordinasi bidang kewaspadaan nasional mencapai 85,40%.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2025 telah terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan. Beberapa indikator bahkan menunjukkan capaian yang melampaui target, sedangkan indikator yang belum mencapai target umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan waktu pelaksanaan, penyesuaian jadwal kegiatan, tingkat partisipasi peserta, serta faktor teknis

dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi ini menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan Renja Tahun 2027, khususnya melalui peningkatan efektivitas perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi agar target kinerja perangkat daerah dapat tercapai secara lebih optimal.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Umum									
	Bidang Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik									
	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	78.50	-	72.50	70.64	97.43	74.20	144.84	92.25%
		Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	95	-	95	95	100	95	190	95
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	13.33%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	15%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%		100%	95%	95%	100%	195%	97.5%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	336 orang/bulan		51 orang/bulan	46 orang/bulan	75.40%	52 orang/bulan	98 orang/bulan	29.16%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	33.33%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	12%	-	13%	13%	100%	12%	25%	104%
	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	285 Paket	-	-	-	-	45 Paket	45 Paket	15.78%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39 orang	-	6 orang	6 orang	100%	6 Orang	12 Orang	30.76%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	34 Paket	-	6 Paket	6 Paket	100%	4 Paket	10 Paket	29.41%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	-	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	4 Paket	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	-	100%	100%	100%	100%	200%	100%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	200 Unit	-	35 Unit	35 Unit	100%	52 Unit	87 Unit	43.5%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	125 Unit	-	13 Unit	13 Unit	100%	34 Unit	47 Unit	37.6%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	1 Unit	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	-	100%	100%	100%	100%	200%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	33.33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	78 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	13 Laporan	25 Laporan	32.05%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	-	100%	84%	84%	100%	184%	92%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	8 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	6 Unit	75%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	-	70 Unit	37 Unit	52.85%	76 Unit	113 Unit	56.5%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM : PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Dilaksanakan	100%	-	100%	100%	100%	100%	200%	100%
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kebijakan Ideologi dan Karakter Kebangsaan yang dihasilkan	40 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	7 Dokumen	13 Dokumen	32.5%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	780 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan	1.380 orang	-	300 Orang	225 Orang	62.67%	300 Orang	525 Orang	38.04%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan								
	Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1.685 Keluarga	-	600 Keluarga	144 Keluarga	24%	600 Keluarga	744 Keluarga	44.15
	Sub Kegiatan : Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	310 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100%	60 Orang	110 Orang	35.48%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan: Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	17 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	5 Dokumen	29.41%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	115 Dokumen	-	-	-	-	25 Dokumen	25 Dokumen	21.73%
	PROGRAM: PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik yang dilaksanakan	95%	-	95%	100%	100%	95%	195%	102%
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	1. Jumlah sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan	82 Kegiatan	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	14 Kegiatan	26 Kegiatan	31.70%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
		2. Persentase ketepatan dan kesesuaian laporan pertanggungjawab an partai politik	86%	-	80%	83%	103%	80%	160%	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	7.700 orang		165 Orang	165 Orang	100%	195 Orang	40 Orang	21%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	73 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	100%	15 Laporan	6 Laporan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
	PROGRAM : PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	93%		85%	82%	88.17%	87%	41.58%	48%
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan	224 Rekomendasi		34 Rekomendasi	38 Rekomendasi	111.76 %	40 Rekomendasi	13 Rekomendasi	32%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	6.030 orang		400 Orang	328 Orang	82%	3.430 Orang	284 Orang	8%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1. Persentase Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan agama yang dilaksanakan	98%		95%	100%	105%	95%	57%	60%
		2. Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	100%		100%	100%	100%	100%	89%	89%
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar)	64 Kelurahan		50 Kelurahan	50 Kelurahan	100%	64 Kelurahan	57 Kelurahan	89%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		2. Persentase Ketahanan keluarga yang difasilitasi	84%		64%	66%	103%	34%	-	-w
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.250 orang		1.387 Orang	1.162 Orang	83.78%	1.754 Orang	297 Orang	17%
	PROGRAM : PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	90%		85%	100%	117%	85%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penanganan Konflik Sosial								
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Rekomendasi forum kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di daerah	105 Rekomendasi		18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	100%	20 Rekomendasi	-	-
		2. Persentase Masyarakat yang mendapatkan pemahaman Kewaspadaan dan Deteksi Dini	85%		75%	85%	113%	85%	-	-
	Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantaun Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitas Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	260 Dokumen		46 Dokumen	37 Dokumen	80.43%	37 Dokumen	11 Dokumen	30%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025- 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2026	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Konflik di daerah yang disusun								
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	2.560 Orang		515 Orang	438 Orang	85.4%	65 Orang	4 Orang	6%
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	72 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.3.2. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam masih menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi kinerja organisasi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

A. Permasalahan Internal

1. Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD mengamanatkan bahwa belanja hibah dalam rangka hubungan antarlembaga pemerintah dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam. Ketentuan tersebut menimbulkan kebutuhan akan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi teknis di bidang teknik sipil/bangunan guna mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan hibah vertikal secara akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Nomenklatur subkegiatan beserta indikator kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dan output pelaksanaan kegiatan hibah vertikal. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pengukuran kinerja.
3. Keterbatasan alokasi anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas berbagai forum dan kelembagaan mitra, seperti Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Lembaga Adat, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, partai politik, serta forum strategis lainnya dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.

B. Permasalahan Eksternal

1. Masih rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, nasionalisme, serta bela negara di sebagian masyarakat.
2. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah apabila tidak dikelola secara tepat.
3. Derasnya arus globalisasi dan masuknya budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila berpotensi mempengaruhi perilaku masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga berdampak pada terjadinya degradasi moral dan nilai-nilai kebangsaan.
4. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia, serta penyelesaian konflik secara damai, yang berpotensi memunculkan konflik sosial dan disintegrasi masyarakat.
5. Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik, kaderisasi, dan penguatan kelembagaan demokrasi.
6. Masih adanya potensi konflik politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagai akibat belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik yang demokratis.
7. Tingkat partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif.
8. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan target maupun rata-rata nasional.

Berbagai permasalahan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Di sisi internal, tantangan berupa penyesuaian regulasi, keterbatasan kompetensi sumber daya aparatur, ketidaksesuaian nomenklatur dan indikator kinerja kegiatan hibah vertikal, serta keterbatasan anggaran mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara itu, dari sisi eksternal masih terdapat berbagai dinamika kehidupan sosial, politik, dan kemasyarakatan yang memerlukan perhatian melalui penguatan ideologi Pancasila, peningkatan

wawasan kebangsaan, penguatan pendidikan politik, pemeliharaan kerukunan masyarakat, serta peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penyempurnaan tata kelola dan regulasi, penguatan sinergi dengan instansi vertikal dan seluruh pemangku kepentingan, serta dukungan pendanaan yang memadai agar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD periode yang berlaku.

2.3.3. Kondisi Lingkungan Dinamis

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam menghadapi berbagai dinamika lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan perangkat daerah. Dinamika tersebut berupa tantangan yang harus diantisipasi serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung terciptanya stabilitas politik, keamanan, ketenteraman, serta kehidupan masyarakat yang harmonis.

Beberapa tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah antara lain:

- a. Kondisi geografis Kota Batam sebagai wilayah perbatasan dan kawasan strategis nasional yang berbatasan langsung dengan negara lain memberikan dampak terhadap tingginya mobilitas penduduk, arus informasi, budaya, dan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut selain memberikan manfaat bagi perkembangan daerah juga berpotensi menimbulkan kerawanan di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan yang memerlukan penguatan kewaspadaan dini serta koordinasi lintas sektor.
- b. Tingginya tingkat heterogenitas masyarakat Kota Batam sebagai daerah tujuan migrasi dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan karakter sosial yang beragam menjadi tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Keberagaman tersebut berpotensi menimbulkan gesekan

- sosial apabila tidak diiringi dengan penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, toleransi, dan semangat kebhinekaan.
- c. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi akibat urbanisasi dan migrasi berdampak terhadap meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial, politik, dan kemasyarakatan yang membutuhkan pengelolaan secara terpadu melalui koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - d. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang sangat cepat memberikan tantangan dalam penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks), ujaran kebencian, provokasi, serta paham-paham yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik masyarakat.
 - e. Masih adanya potensi berkembangnya paham intoleransi, radikalisme, dan aliran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat mempengaruhi kerukunan masyarakat dan memerlukan upaya pembinaan, pencegahan, serta deteksi dini secara berkelanjutan.
 - f. Dinamika politik daerah dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas demokrasi menjadi tantangan dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat, memperkuat etika politik, serta mendorong partisipasi politik yang sehat dan demokratis.
 - g. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Kota Batam yang pesat belum sepenuhnya sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga masih terdapat potensi permasalahan sosial yang dapat mempengaruhi stabilitas masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik.

Di samping berbagai tantangan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah, antara lain:

- a. Posisi strategis Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, pusat industri, investasi, pariwisata, dan logistik internasional menjadi peluang dalam memperkuat kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung terciptanya daerah yang aman, kondusif, dan berdaya saing.
- b. Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan daerah menjadi landasan dalam

- meningkatkan kualitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.
- c. Terjalannya koordinasi dan sinergi yang baik dengan Forkopimda, instansi vertikal, penyelenggara pemilu, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga adat, serta forum-forum strategis daerah menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat dan pencegahan potensi konflik sosial.
 - d. Keberadaan forum kemasyarakatan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), serta organisasi kemasyarakatan lainnya menjadi peluang dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan ketahanan sosial.
 - e. Perkembangan teknologi informasi dan penerapan digitalisasi pemerintahan memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, penyebaran informasi, pelaksanaan pendidikan politik, penguatan komunikasi publik, serta optimalisasi sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan stabilitas daerah.
 - f. Tingginya perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah dapat menjadi modal sosial dalam mendukung pelaksanaan program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, khususnya dalam bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, demokrasi, dan peningkatan kerukunan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam perlu mengoptimalkan berbagai peluang yang tersedia sekaligus melakukan mitigasi terhadap tantangan yang berkembang melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan peran aktif masyarakat. Upaya tersebut diperlukan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat berjalan secara efektif dalam mendukung terwujudnya stabilitas politik, keamanan, kerukunan sosial, dan kualitas demokrasi di Kota Batam.

2.4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memperhatikan saran dan pendapat DPRD yang dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, konsultasi publik, forum perangkat daerah, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang selanjutnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah melakukan telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi terhadap usulan yang diterima, belum terdapat usulan masyarakat maupun pokok-pokok pikiran DPRD yang secara langsung berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

Namun demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam tetap memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2027, khususnya dalam mendukung penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat, peningkatan kerukunan sosial, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan daerah.

Penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027 selanjutnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah daerah, isu strategis daerah, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta kebutuhan pelayanan perangkat daerah.

Tabel 2.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen RKPD Kota Batam Tahun 2027

NO	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
NIHIL										

2.5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pengembangan inovasi daerah merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat reformasi birokrasi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Batam terus mendorong terciptanya budaya inovasi melalui fasilitasi, pembinaan, pendampingan, dan pengembangan inovasi pada seluruh perangkat daerah melalui Makmal Inovasi Daerah. Inovasi yang dikembangkan diharapkan mampu menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan adaptif.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, khususnya dalam bidang pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan politik, serta pemeliharaan stabilitas sosial dan politik daerah, telah dikembangkan inovasi pelayanan masyarakat berupa Pojok Audisi.

Pojok Audisi merupakan media edukasi dan komunikasi kebangsaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Inovasi ini menjadi sarana dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan toleransi, serta mencegah berkembangnya paham radikalisme dan intoleransi yang dapat mengganggu harmonisasi kehidupan bermasyarakat.

Melalui pelaksanaan Pojok Audisi, diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kota Batam terhadap nilai-nilai kebangsaan, sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter, etika sosial, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.

Keberadaan inovasi Pojok Audisi merupakan salah satu bentuk kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam mendukung prioritas pembangunan daerah Tahun 2027, khususnya dalam penguatan wawasan kebangsaan, peningkatan kerukunan masyarakat, dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 2.6 Pengelompokan Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Batam Tahun 2025 Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Batam
Tahun 2027

Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Inovasi	Jenis	Permasalahan	Manfaat	Outcome	Indikator yang Didukung
Prioritas 3: Penguatan Inklusi Sosial untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Adil	Kesbangpol	Pojok Audisi	NonDigital	Partisipasi masyarakat rendah	Edukasi kebangsaan	Wawasan kebangsaan meningkat	Indeks Wawasan Kebangsaan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Bab II, diketahui bahwa capaian kinerja perangkat daerah menunjukkan adanya indikator yang telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, serta masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Terhadap indikator kinerja yang telah mencapai atau melampaui target, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Capaian tersebut menjadi dasar dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program pada tahun berikutnya melalui penguatan strategi, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, terhadap indikator kinerja yang belum mencapai target Renstra, dilakukan evaluasi terhadap faktor penyebab ketidaktercapaian, baik yang berasal dari aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, keterbatasan sumber daya, dukungan anggaran, maupun dinamika lingkungan strategis yang mempengaruhi pencapaian kinerja perangkat daerah. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan program, kegiatan, dan target kinerja Tahun 2027.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam menetapkan target dan sasaran kinerja Tahun 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia, tren capaian kinerja tahun sebelumnya, kebijakan pembangunan daerah, serta kebutuhan peningkatan pelayanan perangkat daerah.

Penetapan target Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, yaitu meningkatkan kualitas pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat, penguatan kerukunan sosial, peningkatan

kewaspadaan dini, serta terciptanya stabilitas politik dan kondisi daerah yang kondusif.

Dengan demikian, target dan sasaran Tahun 2027 merupakan hasil proses evaluasi dan penyesuaian yang bertujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap selaras dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025–2029 serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027

No .	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2027
	Terwujudnya stabilitas daerah yang harmonis untuk keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	Angka Konflik yang terfasilitasi	36 Konflik
1	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	Persentase masyarakat sasaran dan ASN yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	96%
2	Penguatan peran serta masyarakat dalam kehidupan berpolitik	Persentase masyarakat dan partai politik yang dibina	95%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Organisasi Masyarakat yang dibina	Persentase Organisasi masyarakat yang aktif dan berkinerja	75%
4	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya serta toleransi kerukunan bermasyarakat	Persentase konsolidasi kerukunan antar agama	100%
		Persentase Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR)	92%
4	Optimalnya penanganan potensi konflik sosial	Persentase Penanganan Potensi Konflik	85%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90

3.2. Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, serta selaras dengan Prioritas Kota Batam yaitu Penguatan Inklusi Sosial untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Adil. Arah kebijakan ini difokuskan pada penguatan ketahanan ideologi, kehidupan demokrasi,

kerukunan masyarakat, dan stabilitas daerah sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan.

Pelaksanaan arah kebijakan dilakukan melalui pemantapan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, demokrasi, dan hak asasi manusia guna membentuk masyarakat yang memiliki karakter kebangsaan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka memperkuat ketahanan sosial masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam juga mengoptimalkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pembentukan dan penguatan Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba), serta meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan, toleransi, dan harmoni kehidupan antarumat beragama sebagai bagian dari penguatan inklusi sosial.

Selanjutnya, arah kebijakan diarahkan pada peningkatan pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Organisasi kemasyarakatan diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam melaksanakan pendidikan politik dan peningkatan literasi demokrasi bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok strategis masyarakat. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan partisipasi politik yang cerdas, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai demokrasi.

Dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, arah kebijakan juga difokuskan pada penguatan kewaspadaan dini daerah melalui peningkatan koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diarahkan untuk mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan, mencegah konflik sosial, serta menjaga kondusivitas daerah yang menjadi prasyarat utama bagi kelancaran pembangunan dan investasi.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam juga menerapkan arah kebijakan berupa peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik

melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Melalui arah kebijakan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam berkomitmen mewujudkan masyarakat yang berideologi Pancasila, demokratis, harmonis, toleran, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat, sehingga tercipta kondisi daerah yang aman, tertib, inklusif, dan kondusif sebagai landasan dalam mendukung terwujudnya Kota Batam yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tabel 3.2 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Batam	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi,dan Hak Asasi Manusia;		P3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	1.Pemantapan pemahaman masyarakat terkait nilai-nilai ideologi pancasila, karakter kebangsaan dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat 2.Mengoptimalkan pembentukan kelurahan bersinar (Bersih Narkoba) dan meningkatkan peranan FKUB (Forum Koordinasi Umat Beragama) 3.Penguatan Koordinasi Organisasi Masyarakat (ORMAS), memfasilitasi implementasi peraturan Ormas 4.Melaksanakan pendidikan politik kepada pemilih pemula, organisasi dan masyarakat. 5.Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dan forum FKDM, POA, PKS, FDPD dan FORKOPIMDA 6.Melaksanakan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam pada perencanaan tahun 2027 merupakan tahun ke-tiga dalam Renstra Tahun 2025 - 2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam untuk Tahun 2027 melaksanakan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dengan 32 (tiga puluh dua) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

4.1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif			
								Nasional	Provinsi Daerah							
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			62.257.075.391							94.770.594.591					
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			62.257.075.391							94.770.594.591				
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			62.257.075.391							94.770.594.591					
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	95	95 Indeks	11.785.590.937					95	13.471.391.406	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
				Nilai SAKIP PD	72,50	75,30	Nilai					74,30		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persentase	1.704.200				100	15.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	1.063.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;	-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pemerintah Kota	2	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	640.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;	-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pemerintah Kota	3	5.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	Persentase	9.740.940.275					100%	11.422.979.051	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
8	01	01	2.02	0001	Jenya d i a n G a j i d a n T u n j a n g a n A S I I	J u m l a h P r a n g y a n g M e n e r i m a G a j i d a n T u n j a n g a n A S I I		46 P r a n g / b u l a n	9.670.780.275	C o t a B a t a m	I C B D A I A T A N A S I I D A C B A I I I I A D I	- I r i o r i t a s N a s i o n a l I . M e m p e r k o b o h I d e o l o g i l a n d a s i l a . D e m o k r a s i . d a n K a k A s a s i M a n u s i a :		- I r i o n t a s C o t a B a t a m I . l e n g u a t a n i n k l u s i s o s i a l u n t u k m e w u j u d k a n p e m b a n g u n a n y a n g b e r k e b a n g u n a n d a n a d i l		57	11.570.554.750	B a d a n S e s a t u a n B a n g s a D a n l o h t i k	
8	01	01	2.02	0002	J e n y a d i a n A d m i n i s t r a s i l e b a k s a n T u g a s A S I I	J u m l a h D o k u m e n B a s i l J e n y a d i a n A d m i n i s t r a s i l e b a k s a n T u g a s A S I I		12 D o k u m e n	90.160.000	C o t a B a t a m	I C B D A I A T A N A S I I D A C B A I I I I A D I	- I r i o r i t a s N a s i o n a l I . M e m p e r k o b o h I d e o l o g i l a n d a s i l a . D e m o k r a s i . d a n K a k A s a s i M a n u s i a :		- I r i o n t a s C o t a B a t a m I . l e n g u a t a n i n k l u s i s o s i a l u n t u k m e w u j u d k a n p e m b a n g u n a n y a n g b e r k e b a n g u n a n d a n a d i l		12	118.444.501	B a d a n S e s a t u a n B a n g s a D a n l o h t i k	
8	01	01	2.05		A d m i n i s t r a s i l e p e g a w a n P e n g l a t D a e m h	P e r s e n t a s e A S I I y a n g d i t i n g k a t k a n k o m p e t e n s i n y a		12 P e r s e n t a s e	117.997.000							12	82.721.600	B a d a n S e s a t u a n B a n g s a D a n l o h t i k	
8	01	01	2.05	0002	J e n g a d a n l a k e t a n K i n a s b e s e r t a A t r i b u t S e l e n g k a p a n n y a	J u m l a h l a k e t l a k a n K i n a s b e s e r t a A t r i b u t S e l e n g k a p a n		55 l a k e t	40.504.000	C o t a B a t a m	I C B D A I A T A N A S I I D A C B A I I I I A D I	- I r i o r i t a s N a s i o n a l I . M e m p e r k o b o h I d e o l o g i l a n d a s i l a . D e m o k r a s i . d a n K a k A s a s i M a n u s i a :		- I r i o n t a s C o t a B a t a m I . l e n g u a t a n i n k l u s i s o s i a l u n t u k m e w u j u d k a n p e m b a n g u n a n y a n g b e r k e b a n g u n a n d a n a d i l		57	59.605.472	B a d a n S e s a t u a n B a n g s a D a n l o h t i k	
8	01	01	2.05	0009	J e n d i d i b a n d a n l e l a t i h a n l e g a w a i B e r d a s a r k a n T u g a s d a n F u n g s i	J u m l a h l e g a w a i B e r d a s a r k a n T u g a s d a n F u n g s i y a n g M e n g i k u t i J e n d i d i b a n d a n l e l a t i h a n		7 P r a n g	77.695.000	C o t a B a t a m	I C B D A I A T A N A S I I D A C B A I I I I A D I	- I r i o r i t a s N a s i o n a l I . M e m p e r k o b o h I d e o l o g i l a n d a s i l a . D e m o k r a s i . d a n K a k A s a s i M a n u s i a :		- I r i o n t a s C o t a B a t a m I . l e n g u a t a n i n k l u s i s o s i a l u n t u k m e w u j u d k a n p e m b a n g u n a n y a n g b e r k e b a n g u n a n d a n a d i l		7	45.118.128	B a d a n S e s a t u a n B a n g s a D a n l o h t i k	
8	01	01	2.06		A d m i n i s t r a s i l u m P e r a n g k a t D a e m h	P e r s e n t a s e p e m u l u a n p e l a y a n a n u m u m p e r i a n t o r a n		100 % P e r s e n t a s e	555.225.075							100%	445.092.874	B a d a n S e s a t u a n B a n g s a D a n l o h t i k	
8	01	01	2.06	0001	J e n y a d i a n K o m p o n e n I n s t a l a s i l i s t r i k l e n e r a n g a n B a n g u n a n l a n t o r	J u m l a h l a k e t K o m p o n e n I n s t a l a s i l i s t r i k l e n e r a n g a n B a n g u n a n l a n t o r y a n g D i s e d i a k a n		1 l a k e t	8.025.500	C o t a B a t a m	I C B D A I A T A N A S I I D A C B A I I I I A D I	- I r i o r i t a s N a s i o n a l I . M e m p e r k o b o h I d e o l o g i l a n d a s i l a . D e m o k r a s i . d a n K a k A s a s i M a n u s i a :		- I r i o n t a s C o t a B a t a m I . l e n g u a t a n i n k l u s i s o s i a l u n t u k m e w u j u d k a n p e m b a n g u n a n y a n g b e r k e b a n g u n a n d a n a d i l		1	8.565.261	B a d a n S e s a t u a n B a n g s a D a n l o h t i k	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Lembitan dan Lengkapannya Kantor	Jumlah Paket Lembitan dan Lengkapannya Kantor yang Disediakan		6 Paket	141.164.100	Gota Batam	ICEDMIATRI ASII MCEAN (IAB)	- Prioritas Nasional I. Memperkokoh Idemologi Lanuasila. Demokrasi, dan LakAsasi Manusia:		- Inonitas Gota Batam S. Lengutan inkusi sosal untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		6	161.148.171	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	8.844.600	Gota Batam	ICEDMIATRI ASII MCEAN (IAB)	- Prioritas Nasional I. Memperkokoh Idemologi Lanuasila. Demokrasi, dan LakAsasi Manusia:		- Inonitas Gota Batam S. Lengutan inkusi sosal untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		600	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	14.826.800	Gota Batam	ICEDMIATRI ASII MCEAN (IAB)	- Prioritas Nasional I. Memperkokoh Idemologi Lanuasila. Demokrasi, dan LakAsasi Manusia:		- Inonitas Gota Batam S. Lengutan inkusi sosal untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		2	15.812.250	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8	01	01	2.06	0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SICD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SICD		12 Laporan	162.166.075	Gota Batam	ICEDMIATRI ASII MCEAN (IAB)	- Prioritas Nasional I. Memperkokoh Idemologi Lanuasila. Demokrasi, dan LakAsasi Manusia:		- Inonitas Gota Batam S. Lengutan inkusi sosal untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		12	289.148.212	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Ahtik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang with daerah sesuai rencana kebutuhan		100 % Persentase	1.875.464.200							100%	1.046.806.746	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Cendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Cendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan		1 Unit	498.810.000	Gota Batam	ICEDMIATRI ASII MCEAN (IAB)	- Prioritas Nasional I. Memperkokoh Idemologi Lanuasila. Demokrasi, dan LakAsasi Manusia:		- Inonitas Gota Batam S. Lengutan inkusi sosal untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		1	618.190.116	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan		59 Unit	679.411.000	Cota Batam	ICENDIATAI ASII DACBAII (IAR)	- Prioritas Nasional I. Memperkokoh Idemologi Lanuasila . Demokrasi. dan Iak Asasi Manusia :		- Prioritas Cota Batam I . Lenguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Cota	28	200.420.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Lembaran dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Lembaran dan Mesin lainnya yang Disediakan		16 Unit	197.743.200	Cota Batam	ICENDIATAI ASII DACBAII (IAR)	- Prioritas Nasional I. Memperkokoh Idemologi Lanuasila . Demokrasi. dan Iak Asasi Manusia :		- Prioritas Cota Batam I . Lenguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Cota	18	198.996.410	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Insana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Insana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan		0	0	Cota Batam	ICENDIATAI ASII DACBAII (IAR)	- Prioritas Nasional I. Memperkokoh Idemologi Lanuasila . Demokrasi. dan Iak Asasi Manusia :		- Prioritas Cota Batam I . Lenguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Cota	1	10.800.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100 % Persentase	46.491.987								100%	221.501.084	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	2.450.000	Cota Batam	ICENDIATAI ASII DACBAII (IAR)	- Prioritas Nasional I. Memperkokoh Idemologi Lanuasila . Demokrasi. dan Iak Asasi Manusia :		- Prioritas Cota Batam I . Lenguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Cota	12	2.110.219	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Lainnya Ruang Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Lainnya Ruang Kantor yang Disediakan		12 Laporan	44.061.987	Cota Batam	ICENDIATAI ASII DACBAII (IAR)	- Prioritas Nasional I. Memperkokoh Idemologi Lanuasila . Demokrasi. dan Iak Asasi Manusia :		- Prioritas Cota Batam I . Lenguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Cota	12	218.190.363	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	01	2.09		Pembinaan Barang Abit Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Abit Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 % persentase	147.276.200								100%	119.289.051	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
												Nasional						Provinsi	Daerah
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan, Pemrosesan Dinas atau kendaraan Dinas labatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas labatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1 Unit	44.140.000	Cota Batam	ICERMIATAN ASII DACBAI (IAB)	- Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		- Prioritas Cota Batam 2. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		1	1.279.925	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan pencinaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan pencinaannya		2 Unit	49.620.000	Cota Batam	ICERMIATAN ASII DACBAI (IAB)	- Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		- Prioritas Cota Batam 2. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		6	55.471.969	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah lembaran dan Mesin lainnya yang dipelihara		79 Unit	55.516.200	Cota Batam	ICERMIATAN ASII DACBAI (IAB)	- Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		- Prioritas Cota Batam 2. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		70	62.557.157	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8	01	02			PROGRAM PERJALANAN PANCA SILA DAN KARAKTER LEBANGSARI	Persentase kebijakan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100%	100.0 % Persentase	5.220.855.921						100%	5.926.927.156	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8	01	02	2.01		Perumusan kebijakan Teknis dan Penguatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	kebijakan Ideologi dan karakter kebangsaan yang dihasilkan		8 Dokumen	5.220.855.921						9	5.926.927.156	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8	01	02	2.01	0005	kebijaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Lembaran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti kebijaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Lembaran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		125 orang	417.720.000	Cota Batam	ICERMIATAN ASII DACBAI (IAB)	- Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		- Prioritas Cota Batam 2. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		200	500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
												Nasional						Provinsi	Daerah
8	01	02	2.01	0004	lelebsanaan Coordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Lembaran Kebangsaan, Bineta Tunggal Ila dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Prang yang Mengikuti Coordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Lembaran Kebangsaan, Bineta Tunggal Ila dan Sejarah Kebangsaan		200 Prang	92.050.000	Cota Batam	ICERMIATAN ASII PACIBAI (IAB)	- Irioritas Nasional I. Memperiokeh Idemologi la naasila, Demokrsi, dan Iak Asasi Manusia:		- Irioritas Cota Batam S. Ienguatn inklusi sosial untuk mewujudkan pe mbangu nan yang berberhuta n dan adil		190	969.822.415	Ba dan Cesa tua n Bangsa Ba n lo Bti k	
8	01	02	2.01	0006	Iembentukan dan Ienumbuhan Karakter Keluarga Melalui Ieringkatan Kesadaran Masyarakat akan Ieningnya Ienghayatan dan Iengmalan la nashila dalam Iemua Aspek Iehidupan Berwasyrat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Iembentukan dan Ienumbuhan Karakter Keluarga Melalui Ieringkatan Kesadaran Masyarakat akan Ieningnya Ienghayatan dan Iengmalan la nashila dalam Iemua Aspek Iehidupan Berwasyrat, Berbangsa, dan Bernegara		170 Keluarga	34.329.000	Cota Batam	ICERMIATAN ASII PACIBAI (IAB)	- Irioritas Nasional I. Memperiokeh Idemologi la naasila, Demokrsi, dan Iak Asasi Manusia:		- Irioritas Cota Batam S. Ienguatn inklusi sosial untuk mewujudkan pe mbangu nan yang berberhuta n dan adil		190	158.946.268	Ba dan Cesa tua n Bangsa Ba n lo Bti k	
8	01	02	2.01	0008	Iembentukan Iastibnka	Azmah Iastibnka		50 Prang	4.087.496.921	Cota Batam	ICERMIATAN ASII PACIBAI (IAB)			- Irioritas Cota Batam S. Ienguatn inklusi sosial untuk mewujudkan pe mbangu nan yang berberhuta n dan adil		50	1.940.334.500	Ba dan Cesa tua n Bangsa Ba n lo Bti k	
8	01	02	2.01	0009	Iembinaan Ianjutan Iepada Iurnapastibnka Duta la nashila	Iapenn Hasil Iembinaan Ianjutan Iepada Iurnapastibnka Duta la nashila		2 Dokumen	250.653.000	Cota Batam	ICERMIATAN ASII PACIBAI (IAB)	- Irioritas Nasional I. Memperiokeh Idemologi la naasila, Demokrsi, dan Iak Asasi Manusia:		- Irioritas Cota Batam S. Ienguatn inklusi sosial untuk mewujudkan pe mbangu nan yang berberhuta n dan adil		2	55.668.958	Ba dan Cesa tua n Bangsa Ba n lo Bti k	
8	01	02	2.01	0010	Ielaksanaan tugas Iurnapastibnka Duta la nashila	Iapenn Hasil Ielaksanaan Tugas Iurnapastibnka Duta la nashila		20 Dokumen	198.345.000	Cota Batam	ICERMIATAN ASII PACIBAI (IAB)	- Irioritas Nasional I. Memperiokeh Idemologi la naasila, Demokrsi, dan Iak Asasi Manusia:		- Irioritas Cota Batam S. Ienguatn inklusi sosial untuk mewujudkan pe mbangu nan yang berberhuta n dan adil		20	202.460.000	Ba dan Cesa tua n Bangsa Ba n lo Bti k	
8	01	02			P R O G R A M P E R I N G I A T A N P E R A N PARTAI POLITII DAN LEMBAGA PENDIDILAN MELALII PERDILIAN P O L I T I I DAN P E R G E M B A N G A N E T H A S E R T A B I D A Y A P O L I T I I	Pemerkase pendidikan politik yang dilaksanakan	95	95 Pemerkase	6.140.022.165						95	12805.912.574	Ba dan Cesa tua n Bangsa Ba n lo Bti k		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
8	01	02	2.01		Perencanaan, pelaksanaan, Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya, Politik, Pemerintahan, Fasilitas Pembelajaran, Pemertahanan Ilmu/Pemertahanan Ilmu														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
												Nasional						Provinsi	Daerah
						Persentase Masyarakat yang mendapatkan Kewaspadaan dan Deteksi Dini		85 Persentase							85		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		32 Dokumen	34.254.039.968	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- P r i o r i t a s Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		- P r i o r i t a s Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		42	51.632.891.684	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		724 Orang	904.732.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- P r i o r i t a s Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		- P r i o r i t a s Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		1012	655.731.410	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		13 Dokumen	1.650.575.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- P r i o r i t a s Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		- P r i o r i t a s Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		15	3.061.376.906	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
					TOTAL					62 257 075 394			94 776 594 594						

4.2. Rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran dari arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Batam Tahun 2027. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah, mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta memperhatikan isu-isu strategis daerah dan kebijakan pembangunan yang bersifat tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Batam Tahun 2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memfokuskan pelaksanaan program pada peningkatan kualitas demokrasi daerah, penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial, pembinaan organisasi kemasyarakatan, peningkatan pendidikan politik masyarakat, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Pelaksanaan program tersebut diharapkan mampu menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, kondusif, dan mendukung iklim investasi serta percepatan pembangunan daerah.

Rencana pendanaan pada Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai kemampuan keuangan daerah. Pengalokasian anggaran dilakukan berdasarkan prinsip *money follows program* dengan mempertimbangkan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian indikator kinerja perangkat daerah.

Selain mendukung prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana diarahkan dalam RKPD Tahun 2027 dan RPJMN Tahun 2025–2029, khususnya pada agenda penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, supremasi hukum, stabilitas politik dan keamanan nasional, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan politik masyarakat, pembinaan organisasi kemasyarakatan,

peningkatan wawasan kebangsaan, penguatan nilai-nilai Pancasila, pencegahan radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi, serta deteksi dini dan penanganan potensi konflik sosial secara terpadu.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tidak termasuk urusan yang memiliki kewajiban pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 tidak diarahkan untuk memenuhi indikator SPM, melainkan difokuskan pada pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, indikator kinerja daerah, serta sasaran pembangunan yang mendukung terwujudnya stabilitas politik, keamanan, dan ketahanan nasional di daerah.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga mendukung berbagai kebijakan pembangunan tematik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Batam melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan koordinasi dengan instansi vertikal, aparat keamanan, penyelenggara pemilu, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjaga kondusivitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan iklim pembangunan yang aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027 diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, mendukung keberhasilan target pembangunan nasional, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui terciptanya stabilitas politik, keamanan, dan ketahanan bangsa di Kota Batam. Berikut ini dukungan program RKPD Kota Batam Tahun 2027

Tabel 4.2 Dukungan Program RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam terhadap Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2027	Pagu 2027	Perangkat Daerah Pengampu
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila,	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5,230,855,922.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
	2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	6,140,022,165.00	
	3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	1,027,760,000.00	
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	13. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1,263,491,000.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 merupakan ukuran keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. IKU disusun untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik serta menjadi dasar evaluasi kinerja perangkat daerah.

Pada Tahun 2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam menetapkan lima Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan fokus pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, yaitu:

1. Angka Konflik yang Terfasilitasi dengan target 36 konflik. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelesaian konflik sosial melalui upaya deteksi dini, koordinasi, mediasi, serta sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan target dari realisasi tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas penanganan konflik demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Persentase masyarakat sasaran dan ASN yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan target 96%. Target ini merupakan upaya percepatan peningkatan pemahaman masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan wawasan kebangsaan, pembinaan karakter, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
3. Persentase masyarakat dan partai politik yang dibina pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 91%. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja, indikator tersebut berhasil direalisasikan sebesar 94%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan partai politik telah berjalan secara efektif serta didukung oleh koordinasi dan partisipasi para pemangku kepentingan.

Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2025 yang telah melampaui target, serta sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan keberlanjutan pembinaan kepada masyarakat dan partai politik, maka target indikator Persentase masyarakat dan partai politik yang dibina pada Tahun 2027 ditetapkan meningkat menjadi 95%. Penetapan target tersebut mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya, potensi peningkatan yang masih dapat dioptimalkan, serta tetap memperhatikan prinsip realistis, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam Renstra Tahun 2025–2029.

4. Persentase konsolidasi kerukunan antaragama dengan target 100%. Target ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Batam untuk mempertahankan kondisi kehidupan masyarakat yang harmonis melalui koordinasi dan pembinaan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, organisasi keagamaan, dan instansi terkait dalam menjaga toleransi serta mencegah potensi konflik berlatar belakang keagamaan.
5. Persentase Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR) dengan target 92%. Indikator ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas pembentukan dan pembinaan Kelurahan Bersinar sebagai bagian dari strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba melalui sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Secara keseluruhan, Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat ketahanan ideologi, menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah, meningkatkan kualitas demokrasi, memelihara kerukunan masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pencapaian target-target tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif serta terciptanya kehidupan masyarakat Kota Batam yang aman, harmonis, demokratis, dan berwawasan kebangsaan sesuai dengan target RPJMD Tahun 2025–2029.

Tabel 5.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Batam Tahun 2027 dan Target Akhir Tahun 2030

N o	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027	Target Akhir 2029
	Angka Konflik yang terfasilitasi	Konflik	31 Konflik	36 Konflik	187 Konflik
1	Persentase masyarakat sasaran dan ASN yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persentase	40%	96%	96%
2	Persentase masyarakat dan partai politik yang dibina	Persentase	94%	95%	95%
3	Persentase konsolidasi kerukunan antar agama	Persentase	100%	100 %	100%
	Persentase Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR)	Persentase	87.5%	92%	96%

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Berdasarkan ketentuan yang berlaku serta hasil penelaahan terhadap dokumen perencanaan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam pada Tahun 2027 tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan. Oleh karena itu, tidak terdapat target maupun realisasi Indikator Kinerja Kunci yang disajikan dalam dokumen Renja Tahun 2027.

Meskipun demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator program, dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 serta RKPD Kota Batam Tahun 2027. Seluruh program dan kegiatan tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan stabilitas politik, keamanan, ketenteraman masyarakat, peningkatan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, serta pencegahan dan penanganan konflik sosial di Kota Batam.

Dengan demikian, meskipun tidak terdapat Indikator Kinerja Kunci pada Tahun 2027, pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil

melalui indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Batam Tahun 2027				
No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
NIHIL				

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

6.1. Catatan Penting

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi

dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2027, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2027.

6.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 – 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.

6.3. Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program,

- kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
 4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, maka seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD